

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKPJ ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan serta wujud komitmen Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Laporan ini memuat gambaran umum organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja, serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya selama Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKPJ ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, Oleh karena itu maka saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Padang Panjang, 07 Januari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 19811026 200802 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BPKD KOTA PADANG
PANJANG..... 1

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENGAN DAERAH 5

BAB III PROGRAM UNGGULAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BELANJA BPKD
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025..... 24

BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024.... 25

BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN 28

BAB VI PENUTUP 29

A. Kesimpulan 29

B. Saran 29

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel maka pengelolaan keuangan daerah memiliki peranan yang sangat strategis. Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

LKPJ ini memuat informasi mengenai gambaran umum organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja serta permasalahan dan upaya penyelesaian yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025 sehingga penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Melalui penyusunan LKPJ ini maka Badan Pengelola Keuangan Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

BAB I
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.17.276.698.845,06 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.874.418.250 atau 57,15% secara persentase (Kondisi TMT 31 Desember 2025) tetapi Secara Kinerja pada tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan Daerah terealisasi sebesar 96,97% karena ada 1 sub kegiatan yang tidak terlaksana yaitu sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan yang disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi tidak menyanggupi untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di danai oleh bantuan khusus keuangan Kota Padang Panjang dengan pertimbangan :

1. Alokasi Dana BKK dari Kota Padang Panjang belum tertampung dalam DPA maupun DPPA Cabang Dinas Pendidikan wilayah I tahun anggaran 2025
2. Untuk Pembuatan PKS dana BKK akan melibatkan banyak pihak seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, Bagian Pemerintahan maupun Satuan Pendidikan Negeri yang ada di Kota Padang Panjang sementara waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan hanya tersisa 2 bulan lagi
3. Atas keterbatasan waktu dan juga alokasi dana BKK yang belum tertampung dalam DPPA Cabang Dinas Wilayah I tahun anggaran 2025 maka bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk membantu pembiayaan uang Komite pelajar tingkat SMA/ SMK diusulkan untuk dialokasikan Tahun Anggaran 2026

Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
(Kondisi TMT 31 Desember 2025)

No	OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	APBD	8.573.943.095	8.053.658.604	93,93%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	APBD	7.163.469.419	6.796.506.718	94,88%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	7.163.469.419	6.796.506.718	94,88%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	APBD	405.109.196	383.828.971	94,75%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD	9.900.400	6.244.000	63,07%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	94.051.596	84.758.400	90,12%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	18.579.200	14.859.000	79,98%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD	282.578.000	277.967.571	98,37%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	133.980.900	100.486.000	75,00%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	APBD	67.500.000	34.900.000	51,70%
6.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	66.480.900	65.586.000	98,65%
7.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD	637.034.400	607.367.803	95,34%

No	OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
8.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	2.651.600	2.080.000	62,71%
9.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	134.002.000	106.734.837	96,80%
10.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	500.380.800	498.552.966	97,75%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD	234.349.180	165.469.112	70,61%
11.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	177.528.980	132.464.987	78,58%
12.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	30.375.000	13.950.000	70,37%
13.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	APBD	26.445.200	19.054.125	88,29%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	APBD	7.594.484.750	1.340.785.484	17,65%
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	APBD	709.382.000	689.303.750	97,17%
14.		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	APBD	105.493.250	105.425.900	99,49%
15.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	APBD	110.902.450	110.822.550	99,93%
16.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	APBD	375.254.150	361.656.700	96,38%

No	OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
17.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD	117.732.150	111.398.600	94,62%
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	APBD	11.872.000	3.454.500	29,10%
18		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	APBD	11.872.000	3.454.500	29,10%
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	APBD	46.851.100	16.763.450	50,32%
19.		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	APBD	3.195.850	2.878.000	90,05%
20.		Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	APBD	24.155.900	9.227.350	38,20%
21.		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	APBD	5.963.000	4.658.100	78,12%
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pelaksanaan Keuangan Daerah	APBD	6.839.916.000	631.263.784	9,23%
22.		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	APBD	6.239.916.000	631.263.784	10,12%
23.		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	APBD	600.000.000	0	0%
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	APBD	471.984.100	158.541.732	33,59%

No	OPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	APBD	471.984.100	158.541.732	33,59%
24.		Penyusunan Standar Harga	APBD	6.531.800	3.626.750	55,52%
25.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	APBD	6.578.000	5.923.850	90,06%
26.		Penatausahaan Barang Milik Daerah	APBD	71.504.200	7.166.250	10,02%
27.		Pengamanan Barang Milik Daerah	APBD	207.300.000	14.152.500	6,83%
28.		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	APBD	173.574.200	122.763.632	70,73%
29.		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	APBD	6.495.900	4.908.750	75,57%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	APBD	636.286.900	321.432.430	50,52%
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	APBD	636.286.900	321.432.430	50,52%
30.		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	APBD	176.390.000	89.769.600	50,89%
31.		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD	266.495.000	101.533.200	38,10%
32.		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD	70.931.900	57.562.400	81,15%
33.		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD	122.470.000	72.567.230	59,25%
		Jumlah		17.276.698.845,06	9.874.418.250	57,15%

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENGAN DAERAH

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pemerintah, dengan urusan sebagai berikut :

A. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mendapat alokasi anggaran di tahun 2025 sebesar Rp.17.276.698.845,06 dan realisasi sebesar Rp.9.874.418.250,00 atau sebesar 57,15% secara Persentasenya. Untuk lebih jelasnya terkait Program hingga sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2025 adalah dengan uraian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran Rp.8.573.943.095,00 dan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp.8.053.658.718,00 atau 94,88% dengan realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan :
 - a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.163.469.419,00 terealisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp.6.796.506.718,00 atau 94,88% dengan realisasi fisik 100%. Hasil kegiatan ini berupa terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BPKD Kota Padang Panjang selama satu tahun.
 - b) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan :
 - a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.900.400,00 ,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik kegiatan ini adalah 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.6.244.000,00 (63,07). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik untuk kebutuhan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - b. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.051.596,00,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan logistik kantor selama satu tahun dengan realisasi fisik 100% sementara realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.84.758.400,00 (90,12%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan seluruh bahan logistik yang diperlukan untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - c. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.579.200,00,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi umum selama satu 1 (satu) tahun dengan realisasi fisik 100% sementara realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.859.000 (79,98%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetakan, jilid dan Fotocopy pad Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- d. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.282.578.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 (satu) tahun dengan realisasi fisik sebesar 100% sementara realisasi keuangan sebesar Rp. Rp.277.967.571,00 (98,37%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat kantor serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah
- c). **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan sub kegiatan :
- a. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.480.900,00,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor dengan realisasi fisik dari kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.65.586.000,00 (98,65%). Hasil kegiatan ini berupa pengadaan 1 Unit PC, 2 Unit Laptop, 2 Unit Monitor PC, 1 Unit Printer, 1 Unit Scanner, dan 3 unit Kursi
- b. **Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.67.500.000,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya sebesar Rp.34.900.000,00,- (51,70%). Hasil Kegiatan ini berupa tersedianya 1 Unit kendaraan roda 4 yang di gunakan untuk menunjang aktivitas kegiatan di Badan Pengelola Keuangan Daerah
- d). **Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :**
- a. **Penyediaan jasa surat menyurat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.651.600,00,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun dengan realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.080.000,00 (78,44%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat seperti materai dan Paket pengiriman
- b. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.134.002.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.106.734.837,00 (79,65%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening listrik, air PDAM dan Internet selama satu tahun
- c. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.380.800,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangannya sebesar Rp.498.552.966,00 (99,63%). Hasil Kegiatan ini berupa pembayaran Gaji bagi honorer, Upah Tenaga harian lepas dan Tenaga Outsourcing 2 orang selama 12 bulan.

e). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.528.980,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk agar kondisi kendaraan dalam selalu keadaan baik dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.132.464.987,00 (74,62%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, roda dua beserta pajak dan BBM nya.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.375.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan dari peralatan tersebut dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.950.000,00 (45,93%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti : Komputer, Printer, Laptop, CCTV dan lain-lain
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.445.200,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia bangunan untuk memastikan gedung tetap aman. Nyaman dan berfungsi dengan baik selama digunakan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.054.125,00 (72,05%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor pada Badan Pengelola keuangan Daerah dan Gudang Aset

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.594.484.750,00 dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp.1.340.785.484 atau 17,65% dengan realisasi fisik sebesar 90% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.493.250,- Kegiatan ini bertujuan untuk menyingkronkan kebijakan anggaran daerah dengan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan RPJMD/ RKPD dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp.105.425.900,00 (99,94%). Hasil kegiatan ini yaitu agar tersedianya dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS** dengan anggaran sebesar Rp.110.902.450,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk menyingkronkan kebijakan anggaran daerah dengan Perubahan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan RPJMD/ Perubahan RKPD dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp.110.822.550,00 (99,93%). Hasil kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen Perubahan KUA dan PPAS sebanyak 2 Dokumen

- c. **Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD** dengan anggaran sebesar Rp.375.254.150,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan landasan hukum pengelolaan keuangan daerah secara sah dan transparan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.361.656.700,00. Hasil kegiatan ini yaitu tersedianya Dokumen Ranperda dan Perda APBD serta Ranperwako dan Perwako Penjabaran APBD, buku Perwako pergeseran penjabaran APBD dan dokumen standar biaya di kota Padang Panjang
 - d. **Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD** dengan anggaran sebesar Rp.117.732.150,00 kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan landasan hukum perubahan pengelolaan keuangan daerah secara sah dan transparan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp.111.398.600,00 (94,62%). Hasil kegiatan ini yaitu dokumen ranperda dan perda perubahan serta ranperwako dan perwako penjabaran perubahan APBD
- b) **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** dengan sub kegiatan :
- a. **Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait** dengan anggaran sebesar Rp.11.872.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian catatan keuangan antara BPKD dengan instansi terkait dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.454.500,00 (29,10%). Hasil kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 - c) **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** dengan sub kegiatan :
 - a. **Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.195.850,00,- kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan data keuangan antara OPD dan BPKD guna menghasilkan laporan akurat dan tepat waktu dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp.2.878.000 (90,05%). Hasil kegiatan ini yaitu laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. **Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.155.900,00,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui persentase laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp.9.227.350 (38,20%). Hasil kegiatan ini yaitu Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

- c. **Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.963.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati realisasi anggaran secara menyeluruh sebagai bentuk akuntabilitas eksekutif kepada legislatif dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.658.100 (78,12%). Hasil kegiatan ini yaitu Dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- d) **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan sub kegiatan :
 - a. **Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.239.916.000,00,- kegiatan ini bertujuan menyediakan sumber pendanaan cepat guna menanggulangi bencana nasional, peristiwa luar biasa atau keadaan mendesak dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.631.263.784 (10,12%). Hasil kegiatan ini yaitu Dokumen laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.471.984.100,00 dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp.158.541.732,00 atau 33,59% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Penyusunan Standar Satuan Harga** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.531.800,00,- kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan acuan harga satuan barang/ jasa yang wajar dan rasional untuk seluruh OPD dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp. 3.626.750 (55,52%) . Hasil kegiatan ini yaitu dokumen standar Satuan Harga
 - b. **Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.578.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan anggaran secara efisien berdasarkan kebutuhan riil OPD guna mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.923.850 (90,06%). Hasil kegiatan ini yaitu Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - c. **Penatausahaan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.504.200,00,- kegiatan ini bertujuan untuk Mewujudkan tertib administrasi, akurasi data, dan pengendalian Barang Milik Daerah agar tercatat, terlapor, dan dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.166.250

(10,02%). Hasil kegiatan ini yaitu Dokumen laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

- d. **Pengamanan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207.300.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk Melindungi Barang Milik Daerah dari kehilangan, penyalahgunaan, dan kerusakan melalui pengamanan administrasi, fisik, dan hukum dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.152.500,00 (6,83%). Hasil kegiatan ini yaitu Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - e. **Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.574.200,00,- kegiatan ini bertujuan untuk Mewujudkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang optimal, efisien, dan sesuai ketentuan melalui penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan yang tertib dan akuntabel dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.122.763.632,00 (70,73%). Hasil kegiatan ini yaitu Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - f. **Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan laporan Barang Milik Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.495.900,00,- kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan keakuratan data Barang Milik Daerah sebagai dasar penyusunan laporan yang andal dan akuntabel dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.908.750,00 (75,57%). Hasil kegiatan ini yaitu Dokumen laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
4. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.632.286.900,00 dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp.321.432.430,00 atau 50,52%% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan Sub sebagai berikut :
- a. **Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.390.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui analisis, pengembangan, dan perumusan kebijakan pajak yang tepat dan berkelanjutan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.89.769.600 (50,89%). Hasil kegiatan ini yaitu Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
 - b. **Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.266.495.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk Memperoleh data objek pajak daerah yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pemungutan pajak yang optimal dan tertib

administrasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp.101.533.200,00. Hasil kegiatan ini Tersedianya data dan daftar objek pajak daerah yang lengkap, akurat, dan terbaru

- c. **Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.931.900,00,- kegiatan ini bertujuan untuk Menetapkan nilai objek pajak PBB-P2 dan BPHTB secara akurat dan adil sebagai dasar penetapan pajak yang optimal dan sesuai ketentuan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.57.562.400 (81,15%). Hasil kegiatan ini yaitu tersedianya nilai objek pajak PBB-P2 dan BPHTB yang akurat sebagai dasar penetapan besaran pajak yang adil dan optimal
- d. **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.470.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk Menjamin kepatuhan wajib pajak serta mengamankan penerimaan pajak daerah melalui pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.72.567.230 (59,25%). Hasil kegiatan ini yaitu tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

Urusan Pemerintah : KEUANGAN
 OPD Pelaksana : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
			K	(K/Rp)	(%)	Rp	
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100%	100%	100%		
		Jumlah Dana	7.163.469.419,06	6.796.506.718	94,88%		
A.	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%		
		Jumlah Dana	7.163.469.419,06	6.796.506.718	94,88%		
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang/bulan	630 orang/bulan	100%		
		Jumlah Dana	7.163.469.419,06	6.796.506.718	94,88%		
B	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
		Jumlah Dana	405.109.196	383.828.971	94,75%		
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	7 paket	100%		
		Jumlah Dana	9.900.400	6.244.000	63,07%	Ada beberapa komponen pada penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan yang masih bisa dimanfaatkan sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak terealisasi.	Melakukan pengecekan kembali kondisi komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor untuk penganggaran tahun berikutnya

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
2	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 paket	9 paket	100%		
		Jumlah Dana	94.501.596	84.758.400	90,12%		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	100%		
		Jumlah Dana	18.579.200	14.859.000	79,98%		
4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	462 laporan	462 laporan	100%		
		Jumlah Dana	282.578.000	277.967.571	98,37%		
C.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100%	100%	100%		
		Jumlah Dana	133.980.900	100.486.000	75%		
1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit	12 Unit	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
		Jumlah Dana	66.480.900	65.586.000	98,65%		
2	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			
		Jumlah Dana	67.500.000	34.900.000	51,70%	Perencanaan awal bahwasanya Mobil Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah akan dilakukan penyewaan selama 12 bulan, namun karena adanya mutase kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Memastikan kendaraan dinas peruntukan untuk Kaban tahun 2026 agar penganggaran sesuai

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						maka kendaraan Dinas hanya di sewa selama 6 bulan saja karena ada kendaraan dinas yang diperuntukan untuk Kepala Badan terkait mutase tersebut	
E.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100%	100%	100%		
		Jumlah Dana	637.034.400	607.367.803	95,34%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 laporan	3 laporan	100%		
		Jumlah Dana	2.651.600	2.080.000	78,44%	Sampai akhir tahun anggaran tidak ada	Agar merasionalisasikan

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						paket yang akan dikirimkan, begitu juga dengan buku cek dimana anggaran melebihi kebutuhan	anggaran pengiriman paket dan pembelian buku cek
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	60 laporan	100%		
		Jumlah Dana	134.002.000	106.734.837	79,65%		
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 laporan	2 laporan	100%		
		Jumlah Dana	500.380.800	498.552.966	99,63%		
F.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100%	100%	100%		
		Jumlah Dana	233.349.180	165.469.112	70,61%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	23 unit	23 unit	100%		
		Jumlah Dana	177.528.980	132.464.987	74,62%		
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	56 unit	56 unit	100%	Anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan kantor hanya terealisasi sebesar Rp.13.950.000 karena sampai akhir desember 2025 alat-lat kantor yang dipelihara dan mengalami kerusakan hanya	Melakukan pengecekan kembali kondisi peralatan dan mesin kantor yang akan dipelihara.untuk penganggaran tahun berikutnya
		Jumlah Dana	30.375.000	13.950.000	45,93%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						sebanyak yang direalisasikan tersebut	
3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%		
		Jumlah Dana	26.445.200	19.054.125	72,05%	Realisasi keuangan pada kegiatan ini rendah dari yang ditargetkan karena ada beberapa rekening sub kegiatan yang telah dialokasikan untuk di refocusing	Melakukan penyesuaian pagu kembali untuk tahun 2026 sesuai kebutuhan
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan produk anggaran yang tertib, efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%		
		Jumlah Dana	7.594.484.750	1.340.785.484	17,65%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
A.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD/APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%		
		Jumlah Dana	709.382.000	689.303.750	97,17%		
1	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%		
		Jumlah Dana	105.493.250	105.425.900	99,94%		
2	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%		
		Jumlah Dana	110.902.450	110.822.550	99,93%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	6 dokumen	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
		Jumlah Dana	375.254.150	361.656.700	96,38%		
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 dokumen	4 dokumen	100%		
		Jumlah Dana	117.732.150	111.398.600	94,62%		
B.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%		
		Jumlah Dana	11.872.000	3.454.500	29,10%		
1	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.	2 dokumen	2 dokumen	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
		Jumlah Dana	11.872.000	3.454.500	29,10%	Kegiatan rekonsiliasi yang biasanya dilakukan di Padang Panjang pada tahun 2024 ini dilakukan di Bukittinggi sehingga biaya makan dan minum rapat tidak terealisasi, dan honor pendampingan SIPKD yang pencairannya hanya jika ada kendala dengan aplikasi saja.	Alokasi anggaran/ kebutuhan anggaran tidak bisa diprediksi
C.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu sesuai dengan SAP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
		Jumlah Dana	33.314.750	16.763.450	50.32%		
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.	8 Laporan	8 Laporan	100%		
		Jumlah Dana	3.195.850	2.878.000	90,05%		
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD,BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	7 laporan	7 laporan	100%	Realisasi keuangan pada kegiatan ini rendah dari yang ditargetkan karena ada beberapa rekening sub kegiatan yang telah dialokasikan untuk di refocusing	Melakukan penyesuaian pagu kembali untuk tahun 2026 sesuai kebutuhan
		Jumlah Dana	24.155.900	9.227.350	38,20%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
	Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot					
		Jumlah Dana	5.963.000	4.658.100	78,12%		
D.	Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%		
1	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 laporan	1 laporan	100%		
		Jumlah Dana	6.239.916.000	631.263.784	10,12%	Pada akhir tahun anggaran 2025 dimana setelah kejadian bencana banjir dan	Dana bantuan akan segera di salurkan ke OPD-OPD yang mempunyai

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						longsor yang melanda Kota Padang Panjang khususnya maka Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan bantuan terkait bencana tersebut dari Bapak Presiden, Dana bantuan yang di salurkan melalui provinsi dan juga bantuan dari daerah lainya sehingga anggaran tersebut di pos kan di kegiatan	kewenangan untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Dana	600.000.000	0	0%	sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan tidak terlaksana karena disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi menyanggupi untuk	Menganggarkan kembali pada tahun 2026 dengan melakukan pembahasan dan persiapan yang lebih tepat sasaran agar sub kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di danai oleh bantuan khusus keuangan Kota Padang Panjang	
III	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyajian laporan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%		
		Jumlah Dana	11.872.000	3.454.500	29,10%		
A.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan dan penyajian data BMD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%		
		Jumlah Dana	11.872.000	3.454.500	29,10%		
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%		
		Jumlah Dana	6.531.800	3.626.750	55,52%	Belanja makan minum dan biaya cetak yang	Menyiapkan perencanaan

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						telah dianggarkan tidak terealisasi karena ada beberapa standar harga yang hanya di survei melalui media online dan buku Standar satuan harga hanya di bagikan 1 buku untuk masing masing OPD dan di tambah dengan soft copy saja untuk seluruh OPD tersebut	anggaran dan belanja yang lebih matang
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	2 dokumen	2 dokumen	100%		
		Jumlah Dana	6.578.000	5.923.850	90,06%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
3	Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatusahaan BMD	2 laporan	2 laporan	100%	Pada Perubahan tahun 2025 direncanakan untuk membeli windows server namun setelah dilakukan survei ke lapngan tetapi anggaran yang tersedia tidak bisa untuk membeli windows server yang bisa mendukung aplikasi yang digunakan	Pada tahun 2026 agar menganggarkan kembali pembelian windows server sesuai dengan kebutuhan dan pagu yang dibutuhkan
		Jumlah Dana	71.504.200	7.166.250	10,02%		
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	3 laporan	3 laporan	100%	Kegiatan Pengamanan BMD tidak terealisasi keuangannya secara	Belanja asuransi di kembalikan ke OPD masing-masing
		Jumlah Dana	207.300.000	14.152.500	6,83%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						maksimal karena pada awalnya belanja asuransi kendaraan dinas akan dikelola oleh bidang BMD namun setelah penelaahan lebih lanjut terhadap Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD asuransi merupakan bagian dari pengamanan BMD yang menjadi tanggung jawab	

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						masing-masing pengguna barang	
5	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan,pemindahtanganan,pe musnahan dan penghapusan barang	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	4 dokumen	4 dokumen	100%		
		Jumlah Dana	173.574.200	122.763.632	70,73%	Kegiatan Optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah pada tahun 2025 ini telah berjalan dengan baik dan ini	Menyiapkan perencanaan kegiatan, anggaran dan belanja yang lebih matang

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						dibuktikan dengan keberhasilan Bidang Pengelolaan BMD melakukan penilaian BMD sebanyak 38 objek, dan 22 objek diantaranya adalah dengan tujuan untuk pemanfaatan BMD. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal karena adanya penambahan anggaran pada perubahan anggaran 2025, sebagai	

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						antisipasi jika ada permohonan dari OPD untuk pemusnahan maupun pemanfaatan BMD.	
6	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil rekonsolidasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	2 laporan	2 laporan	100%	Pada tahun 2025 ini, Bidang BMD telah melakukan inovasi dengan melakukan	Menyiapkan perencanaan kegiatan, anggaran dan belanja yang lebih matang
		Jumlah Dana	6.495.900	4.908.750	75,57%	Rekonsiliasi BMD setiap triwulannya yang sebelumnya hanya dilakukan setiap semester. Anggaran yang tidak terserap	

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						maksimal karena kegiatan Rekonsiliasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan penatausahaan di waktu yang sama.	
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	2%	10,03%	501,5%		
		Jumlah Dana	636.286.900	321.432.430	50,52%		
A.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pencapaian pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah	96.113.171.014	81.181.799.592	84,46%		
1	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	9 dokumen	9 dokumen	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
		Jumlah Dana	176.390.000	89.769.600	50,89%	Honor tenaga ahli yang telah dianggarkan namun tidak bisa dibayarkan karena ada beberapa poin persyaratan yang harus di lengkapi dengan batas waktu yang telah ditentukan namun tidak bisa dipenuhi sehingga anggarannya tidak bisa kita realisasikan	Menganggarkan Kembali pada tahun 2026 dengan ketentuan dan kejelasan yang harus di bahas dahulu dengan tim ahli tersebut
2	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	2 laporan	2 laporan	100%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
		Jumlah Dana	266.495.000	101.533.200	38,10%	Honor tenaga ahli yang telah dianggarkan namun tidak bisa dibayarkan karena ada beberapa poin persyaratan yang harus di lengkapi dengan batas waktu yang telah ditentukan namun tidak bisa dipenuhi sehingga anggarannya tidak bisa kita realisasikan	Menganggarkan Kembali pada tahun 2026 dengan ketentuan dan kejelasan yang harus di bahas dahulu dengan tim ahli tersebut
3	Penilaian PBB-P2 serta BPHTB	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	400 objek pajak	400 objek pajak	100%		
		Jumlah Dana	70.931.900	57.562.400	81,157%		

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
4	Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah, jumlah objek pajak dan jumlah OPD pengelola retribusi	72 dokumen	72 dokumen	100%		
		Jumlah Dana	122.470.000	72.567.230	59,25%	Honor yang di anggarkan di awal tahun untuk 6 bulan kegiatan Penegakan Perda tetapi hanya terealisasi sebanyak 2 bulan karena kegiatan ke lapangan kita hanya ke lapangan hanya 2 bulan Dimana Target	Melakukan perhitungan Kembali terkait berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan agar di sesuaikan dengan penganggarannya

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Fisik/ Rp		Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1	2	3	4	5		6	7
						nya telah selesai dengan waktu 2 bulan	

BAB III

PROGRAM UNGGULAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PADA TAHUN 2025

Program unggulan merupakan program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat dimana pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan Wali Kota Padang Panjang untuk periode 2025-2029 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan namun berdasarkan RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan teruntuk Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak ada Program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 tersebut

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Panjang tahun 2024 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna. Kemudian DPRD juga telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut sehingga Dari rekomendasi yang disampaikan DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Padang Panjang tahun 2024 yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah :

3. Pemerintah Kota Padang Panjang harus segera menyikapi wacana Pemerintah Pusat membatasi belanja Pegawai maksimal 30% yang akan efektif tahun 2027. Hal ini tentu menjadi pemikiran kita bersama dan melakukan langkah-langkah antisipatif, salah satunya dengan membatasi dan lebih selektif dalam menerima ASN pindahan dari luar kota Padang Panjang sehingga tidak menjadi beban belanja tambahan pegawai

Tanggapan :

Tahun 2025 Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan penurunan belanja pegawai yaitu dengan tidak lagi membayarkan Tambahn Penghasilan berdasarka beban kerja kepada ASN yang telah mendapatka penghasilan tambahan berdasrkan pertimbangan objektif lainnya (telah mendapatkan tunjang sertifikasi dan jasa pelayanan dan penurunan tambahan penghasilan langsung oleh ASN)

17. Beberapa kantor OPD masih belum jelas status kepemilikan tanah dan bangunannya serta tidak representatif harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk mengupayakan pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap denga mengalokasikan anggaran untk kegiatan dimaksud setiap tahun anggaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan

Tanggapan : Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Pemko Padang Panjang telah menyiapkan beberapa alternatif dengan memaksimalkan gedung pemerintah lainnya bagi OPD yang masih berada di tanah milik instansi lainnya

24. Pemerintah kota Padang Panjang agar lebih intens dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana/ bantuan untuk Pemerintah Kota Padang Panjang

Tanggapan :

Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2025 ini sudah mengajukan proposal kepada Pemerintah Pusat sebanyak 74 buah proposal semuanya masih berproses di pusat semoga tahun 2026 ini kita bisa melihat realisasi dari proposal yang sudah kita sampaikan tersebut

26. Pemerintah kota Padang Panjang kiranya berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD Kota Padang Panjang karena lebih kurang 10 tahun PAD kota Padang Panjang berjalan stagnan tidak ada peningkatan yang signifikan.

Tanggapan :

Pemerintah Kota Padang Panjang telah berupaya maksimal dalam meningkatkan PAD dan perlu kami sampaikan kurun waktu 2018-2023 terjadi pertumbuhan PAD yang signifikan sebesar 28,28% yakni dari Rp.79.752.372.829,53 menjadi Rp.102.302.543.259,24 meskipun demikian sempat berkontraksi pada 2024 akibat bencana gempa dan terputusnya jalan akses utama dari dan menuju kota Padang Panjang selama 4 bulan, tren positif kembali terlihat tahun 2025 saat ini PAD berhasil kembali menembus angka Rp.100,43 M yang menandakan momentum pemulihan ekonomi daerah berjalan dengan baik

26. Pemerintah kota Padang Panjang untuk lebih memperhatikan tentang penertiban aset Pemerintah, termasuk tanah-tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat

Tanggapan :

Terkait penertiban BMD bidang BMD bersama OPD terkait telah melakukan penertiban aset sejak tahun 2024 ada 4 bidang tanah yang telah berhasil kita tertibkan dan satu bidang tanah sedang berproses hukum di pengadilan negeri karena pihak ketiga yang ditertibkan melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk diketahui pada tahun 2025 ini aset yang dikuasai oleh pihak ketiga telah berhasil dikuasai kembali seperti tanah sebelah gor, tanah sebelah Pol PP dan tanah dekat Matahari Bangunan dan 1 unit roda dua dari pensiunan yang berdomisili di Agam

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada tahun anggaran 2025 Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak ada melaksanakan program/kegiatan tugas pembantuan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 pada dasarnya merupakan evaluasi dan gambaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh BPKD Kota Padang Panjang tahun 2025 sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan BPKD Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Saran/Rekomendasi

Melalui LKPJ BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Padang Panjang Tahun 2025. Untuk lebih mengoptimalkan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah disusun, diharapkan dukungan dan komitmen serta konsistensi dari *stakeholders*, hal ini semakin terasa manakala fungsi BPKD Kota Padang Panjang ke depan semakin luas dan semakin intensif.

Demikianlah LKPJ BPKD Kota Padang Panjang tahun 2025 ini disampaikan, semoga dapat dimaklumi dan terima kasih.

Padang Panjang, 07 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

ZIA UL FIKRI, SE

NIP. 19811026 200802 1 001

